

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai analisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk terhadap disparitas pendapatan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Disparitas pendapatan di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2006 sampai tahun 2013 cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata kabupaten sebesar 0,185 dan rata-rata kota sebesar 0,321.
2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode 2006-2013 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produk Domestik pada daerah kabupaten mengalami peningkatan sebesar 4,32% sedangkan Produk Domestik Regional Bruto pada daerah kota mengalami peningkatan sebesar 4,29%.
3. Perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat di daerah kabupaten dari tahun 2006 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan di daerah kota dari tahun 2006 sampai tahun 2013 cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya.
4. Koefisien determinasi yang diperoleh di kabupaten sebesar 0,800. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk menjelaskan

variabel dependen yaitu disparitas pendapatan sebesar 80%. Sisanya sebesar 20% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

5. Koefisien determinasi yang diperoleh di kota sebesar 0,669. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk menjelaskan variabel dependen yaitu disparitas pendapatan sebesar 66,9%. Sisanya sebesar 33,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan pada  $\alpha = 0,05$  dimana nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel, yaitu  $3,982 > 2,015$ .
7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kota menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan pada  $\alpha = 0,05$  dimana nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel, yaitu  $2,631 > 2,015$ .
8. Jumlah penduduk di kabupaten menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan pada  $\alpha = 0,05$  dimana nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel, yaitu  $3,787 > 2,015$ .
9. Jumlah penduduk di kota menunjukkan hubungan yang negatif dan tidak signifikan pada  $\alpha = 0,05$  dimana nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel, yaitu  $1,056 < 2,015$ .

## 6.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pemerataan pendapatan dan mengurangi disparitas pendapatan adalah :

1. Pemerintah diharapkan mampu menanggulangi masalah disparitas pendapatan pada daerah kabupaten melalui pemberian bantuan langsung kepada masyarakat. Bantuan langsung tersebut dapat berupa bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin. Selain itu pemerintah juga dapat memberikan bantuan berupa pemberian modal contohnya pemberian pinjaman dengan bunga yang rendah. Kebijakan ini juga dapat diterapkan untuk menanggulangi permasalahan disparitas pendapatan pada daerah perkotaan. Serta pemerintah juga dapat memberikan bantuan berupa alat-alat pertanian kepada masyarakat. manusia seperti dengan pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi.
2. Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian program beasiswa bagi pelajar yang berprestasi serta melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Pada masyarakat kabupaten pemerintah dapat memberikan pelatihan tentang pertanian sehingga bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang pertanian dapat menambah output yang dihasilkan. Peningkatan output dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat disparitas pendapatan. Sedangkan pada masyarakat perkotaan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat memperluas

kesempatan kerja masyarakat baik dalam bidang pemerintahan maupun swasta.

3. Pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan pajak progresif bagi golongan menengah keatas untuk mengatasi masalah disparitas pendapatan yang terdapat pada daerah perkotaan. Selain penetapan pajak progresif pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya.
4. Pemerintah juga harus menciptakan lapangan kerja baik untuk masyarakat yang ada di kabupaten maupun kota. Adanya lapangan kerja baru dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan mengurangi tingkat disparitas pendapatan baik yang ada di kabupaten maupun disparitas pendapatan yang ada di kota.

